

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan atau pedoman dalam pembahasan karya ilmiah ini, peneliti membuat penelitian terdahulu yang saling berhubungan antara masalah yang dibahas dengan pedoman atau landasan yang telah ditentukan yaitu yang berkaitan dengan topik karya ilmiah ini yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Berdasarkan penulisan karya ilmiah oleh *Aryobimo, Putut Tri (2012)* yang mengkaji tentang “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris yang Dilakukan Berdasarkan Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”.

Kesimpulan dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada atau terdapat sebuah persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus yang telah diberikan, kondisi keuangan oleh wajib pajak, dan preferensi risiko yang dimana memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian oleh *Jatmiko, Agus Nugroho (2006)* yang melakukan pengkajian tentang “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Yang Dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”.

Kesimpulan yang telah disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa terdapat beberapa sikap yang dilakukan oleh wajib pajak yang mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan berbagai kategori, diantaranya adalah berupa pelaksanaan sanksi denda, dalam segi pelayanan fiskus, dan kesadaran akan perpajakan yang seluruhnya secara parsial berpengaruh positif dan cukup signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dituliskan oleh *Mutia, Sri Puti Tita (2014)* yang mengkaji tentang “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Yang Dilakukan Pada Kantor Pajak Pratama Kota Padang)”.

Kesimpulan yang dapat disimpulkan melalui penelitian yang sudah ditulis yaitu sanksi-sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran perpajakan juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh cukup signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari ketiga Penelitian Terdahulu yang telah disebutkan diatas dapat diambil atau ditarik kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan tentang topik yang telah dibahas antara peneliti terdahulu dengan topik yang dibahas oleh penulis. Persamaan diantara ketiga penelitian terdahulu diatas adalah sama-sama membahas mengenai topik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Persepsi Yang Positif yang Dirasakan Oleh Wajib Pajak. Adapun perbedaan yang ada didalam topik yang telah dibahas oleh peneliti terdahulu dengan penulis adalah terletak

pada waktu pelaksanaan penelitian dan tempat pelaksanaan penelitian. Peneliti terdahulu menggunakan berbagai macam metode pengambilan sampel diantaranya, dengan menggunakan metode *convenience sampling*, dengan menggunakan metode *Proportional Sampling (acak)*, dan dengan menggunakan metode *Proposional Sampling*. Sedangkan penulis sendiri menggunakan metode pengambilan sample secara *Deskriptif Kuantitatif*.

B. Landasan Teori

1. Pengertian atau Makna Pajak

Pengertian dari pajak adalah “Kontribusi atau pembayaran wajib kepada sebuah negara yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya adalah memaksa berdasarkan Peraturan Undang-Undang, dimana imbalan yang diterima tidak secara langsung dan kontribusi atau dana tersebut digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat, menurut (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1)”. Salah satu faktor pendorong dari sumbangan terbesar negara adalah pembayaran atau pemungutan pajak yang secara sukarela dan dilaksanakan oleh setiap warga negara yang berada di Negara Republik Indonesia. Dan hasil pemungutan yang diperoleh dari pemungutan pajak tersebut digunakan oleh Pemerintah Negara Indonesia untuk melakukan kontribusi pembangunan terhadap Negara Republik Indonesia dengan tujuan agar memakmurkan warga Negara Indonesia. Tanpa dilakukan pemungutan pajak ini, maka Negara Indonesia tidak dapat berkembang pesat dan tidak dapat melakukan pembangunan dan hal ini

akan berdampak kepada kemakmuran yang akan dirasakan oleh Warga Negara Indonesia. Pajak merupakan salah satu kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari Negara Republik Indonesia yang telah ditetapkan atau disahkan menurut Undang-Undang Wajib Pajak yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal atau sudah menetap di Negara Indonesia.

“Pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat kepada kas atau keuangan negara yang sesuai dengan undang-undang (sifatnya adalah memaksa) dengan tidak diberi jasa timbal balik (kontra prestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum sebuah negara. Definisi tersebut kemudian dikoreksi lagi atau diteliti kembali agar lebih jelas dan berbunyi: Pajak merupakan suatu peralihan kekayaan yang berupa materi dari pihak rakyat (khususnya wajib pajak) kepada Negara guna menambah jumlah Kas atau Pendapatan oleh Negara yang dipergunakan untuk mendanai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan sebagai public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai adanya *public investment menurut* (Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, tanpa tahun).

Selain pengertian menurut undang-undang, pajak sendiri merupakan suatu kontribusi wajib oleh warga negara atau sebuah iuran wajib masyarakat Indonesia kepada negara yang memiliki sifat memaksa sesuai kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, dimana uang yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut digunakan oleh pemerintah negara untuk memberikan fasilitas-fasilitas umum kepada masyarakat Negara Indonesia seperti pembangunan jalan tol, pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan dan lain

sebagaimana atau juga melakukan pelayanan kepada masyarakat negara Indonesia agar suatu negara dapat melakukan pembangunan dan mencapai kemakmuran walaupun masyarakat tidak dapat merasakan imbalannya secara langsung. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga negara hanya berlaku kepada warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.

Didalam pengertian yang berdasarkan atas Undang-undang tersebut terdapat beberapa komponen yang perlu diingat diantaranya adalah :

- a. Pajak adalah kontribusi wajib dari tiap-tiap warga negara.

Kontribusi wajib bagi warga negara dalam hal ini mengandung makna bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban dalam hal pembayaran pajak. Didalam UU KUP sudah dijelaskan bahwa walaupun pajak merupakan kontribusi atau pembayaran yang wajib bagi seluruh warga negara, dan hanya orang-orang atau wajib pajak yang mampu untuk memenuhi persyaratan lah yang dapat dikategorikan wajib untuk dikenakan pajak baik dikategorikan sebagai syarat subjektif maupun syarat objektif. Dikatakan syarat subjektif apabila syarat wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tentang subjek pajak dan diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1984 serta perubahannya. Dan dikatakan objektif apabila subjek pajak sudah memperoleh penghasilan dari setiap bulannya dari pekerjaan atau profesi yang dijalankan. Subjek pajak sudah dijelaskan didalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tentang Pajak Penghasilan. Dan syarat objek pajak yang sudah dijelaskan didalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Tentang Pajak Penghasilan.

- b. Sifat yang memaksa atas kewajiban pajak bagi setiap warga negaranya.

Maksud dari kata “memaksa” dalam konteks ini adalah bahwa apabila seorang wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakan tidak mampu memenuhinya atau tidak membayar kewajibannya. Dan seorang wajib pajak yang tidak dapat memenuhi atau membayar kewajibannya dalam membayar pajak maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan yang sah.

- c. Imbalan yang diterima dari pembayaran pajak tidak dirasakan secara langsung.

Sifat imbalan pajak berbeda dengan sifat imbalan dari retribusi. Apabila retribusi imbalan yang didapat bersifat langsung setelah uang dengan jumlah tertentu dibayarkan. Contoh dari retribusi adalah retribusi penginapan, retribusi tempat parkir, retribusi pertokoan dan lain sebagainya. Dan didalam pajak, imbalan yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah misalnya dalam bentuk perbaikan dari fasilitas umum seperti jalan raya, pembangunan jembatan, pembangunan jalan tol dan lain sebagainya.

2. Kepatuhan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut atau berdasarkan atas Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kepatuhan berarti terdapat suatu niat yang harus diimbangi dengan sikap/perilaku agar muncul sikap patuh dan tunduk dalam melaksanakan segala peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan dapat diartikan sebagai inisiatif atau kemauan dari diri seseorang, baik kelompok atau dalam sebuah organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan peraturan yang telah disahkan dan ditetapkan, menurut (Jatmiko,2006). Pentingnya dalam melakukan sebuah

interaksi baik antara sebuah individu, kelompok, maupun organisasi sangat berpengaruh positif terhadap sikap patuh seseorang dalam menyikapi berbagai hal. Kepatuhan memiliki arti atau makna bahwa seseorang harus bersikap tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah disahkan dan ditetapkan. Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Nurnia Rahayu (2006) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau keadaan dimana Wajib Pajak mampu atau sanggup untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan mampu untuk melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Simon James et al (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi (2005), maksud dari kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak diharapkan atau dituntut untuk bersedia memenuhi tanggungan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan, dilakukan investigasi seksama, dilakukan sebuah peringatan ataupun ancaman, dalam pelaksanaan penerapan sanksi baik dalam sektor hukum maupun administrasi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Caroko (2014) menghasilkan penelitian bahwa pengetahuan tentang perpajakan memunculkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nurmanto, (2003) mengartikan bahwa kepatuhan terhadap perpajakan adalah sebagai suatu keadaan atau kondisi dimana wajib pajak dituntut untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak atas perpajakannya. Arti dari Kepatuhan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” atas kepatuhan dan tingkat atas kesadaran pemenuhan

kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang tercermin dalam sebuah situasi atau kondisi (Devano dalam Supadmi, 2010), yaitu sebagai berikut :

- a. Wajib pajak diharapkan paham atau berusaha untuk memahami dan mempelajari semua ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- b. Melakukan pengisian formulir pajak secara lengkap dan jelas.
- c. Melakukan perhitungan atas jumlah pajak yang terutang atau yang harus dibayar dengan benar.
- d. Tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajaknya.

Dari berbagai pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap perpajakan merupakan sebuah sikap dimana wajib pajak dituntut untuk tunduk dan patuh atas peraturan atau Undang-Undang tentang Perpajakan yang telah ditetapkan dan wajib pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban pajaknya sebagai seorang wajib pajak dan mampu melaksanakan hak perpajakannya agar wajib pajak ikut berperan atau turut andil dalam kontribusi pembangunan yang dilakukan oleh negara dan diharapkan wajib pajak membayar pajak secara sukarela walaupun wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung. Kepatuhan oleh wajib pajak merupakan aspek yang terpenting karena Negara Indonesia menganut pada sistem *Self Assessment* yang secara mutlak dalam menjalankan proses sistemnya wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri kewajiban pajak yang harus dibayarkan, membayar kewajiban pajak sesuai dengan perhitungan wajib pajak sendiri, dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh (Rustiyaningsih, 2011), kepatuhan dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu kepatuhan formal dan

kepatuhan material. Pengertian dari kepatuhan formal adalah sebuah kondisi dimana wajib pajak mampu atau sanggup untuk memenuhi kekewajiban pajaknya secara formal yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan didalam Undang-undang Perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mampu atau sanggup untuk memenuhi ketentuan-ketentuan material perpajakan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perpajakan. Kepatuhan yang bersifat material juga mencakup dari kepatuhan formal.

Melalui penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT, kepatuhan formal dapat dilihat. Hal ini dikarenakan kepatuhan formal merupakan suatu kepatuhan yang memiliki hubungan dengan kewajiban secara formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Muliari dan Setiawan (2011) berpendapat bahwa terdapat beberapa kriteria agar seseorang dikategorikan sebagai wajib pajak patuh yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria dari wajib pajak patuh adalah :

- a. Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPT untuk semua jenis pajak baik pribadi, badan, maupun lembaga dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak memiliki tunggakan atas pajak yang mencakup semua jenis pajak, kecuali telah mendapatkan izin untuk melakukan pengangsuran atau menunda pembayaran kewajiban pajak.
- c. Dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, tidak pernah terlibat sedikitpun atas tindak pidana kejahatan dibidang perpajakan.

- d. Dalam dua tahun terakhir melakukan penyelenggaraan pembukuan dan wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, dan melakukan koreksi atau penelitian pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang dengan paling banyak lima persen.
- e. Dalam dua tahun terakhir wajib pajak melakukan pengauditan atas laporan keuangannya oleh akuntan publik dengan pendapat yang wajar tanpa dilakukan pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laporan laba rugi yang digunakan untuk melakukan perhitungan atas PPh Yang Terutang atau biasa disebut laporan laba rugi fiskal.

Dalam hal kegiatan pemungutan pajak, pemerintah tentunya melakukan suatu tindakan yang tegas kepada seluruh wajib pajak untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak tunduk dan patuh terhadap segala peraturan mengenai perpajakan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh (Arum, 2012) menyatakan bahwa pengertian dari ketegasan sanksi pajak merupakan suatu tindakan tegas yang dilakukan baik berupa hukuman atau sanksi yang ditujukan kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan. Makna dari tindakan tegas yang dilakukan kepada wajib pajak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang berupa sanksi atau hukuman yang diberlakukan atau dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang telah ditetapkan. Peraturan perundang-undangan dalam konteks ini adalah sebagai pedoman tentang berbagai macam hal apapun yang perlu untuk dilakukan dan hal-hal apa saja yang tidak patut untuk dilakukan.

3. Beberapa Faktor Yang Berdampak Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh (Devano dalam Supadmi, 2010) memberikan penjelasan mengenai beberapa faktor yang memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya :

- a. Pemahaman Terhadap Sistem *Self Assesment* Dan Ketepatan Dalam Melakukan Pembayaran Pajak.

Dalam menjalankan sistem *Self Assesment*, wajib pajak dipercaya untuk menghitung sendiri berapa kewajiban pajak yang harus dibayarkan, serta melakukan pelaporan SPT secara individu sesuai dengan perhitungan wajib pajak sendiri. Sistem *Self Assesment* menuntut wajib pajak untuk ikut berperan aktif untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakannya. Harahap, 2004 dalam (Supadmi, 2010) mengemukakan bahwa Sistem *Self Assesment* mencakup sebuah misi dan konsekuensi terhadap suatu perubahan sikap (kesadaran) kepatuhan warga masyarakat atau wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela (*voluntary compliance*). Tahapan sistem yang digunakan dalam *Self Assesment* yaitu dengan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan sendiri nominal pajak terutang yang harus dibayarkan, melakukan penyetoran sendiri, dan melakukan pelaporan SPT atas kewajiban pajak yang telah dipenuhi. Hal ini berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan oleh Supadmi (2006). Sistem *Self Assesment* yang digunakan yaitu bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajibannya untuk mengisi dan menyampaikan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sesuai dengan kondisi atau keadaan dari wajib pajak itu sendiri. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan oleh

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, maka dibutuhkan tingkat kebenaran dan ketelitian dalam melakukan perhitungan, melakukan ketepatan dalam hal penyeteran, dan juga ketelitian dalam hal menyampaikan atau melakukan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan tepat dan akurat.

b. Kualitas atau Mutu Pelayanan

Suatu pelayanan dapat dikategorikan sebagai pelayanan yang berkualitas apabila dapat mencakup keamanan yang diberikan, kenyamanan yang telah diciptakan, kelancaran dari proses yang diperlukan dan kepastian atas hukum. Sebuah aparat pajak dapat dikategorikan mampu memberikan kualitas pelayanan yang baik jika mampu memberikan sebuah pelayanan yang memuaskan, menanggapi berbagai permasalahan dengan cepat dan tanggap, skill atau kemampuan dalam hal pelayanan, bersikap sopan dan santun dan memiliki sikap yang dapat dipercaya.

c. Kualitas Tinggi Rendahnya Pendidikan

Kualitas pendidikan memiliki dampak terhadap tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak juga akan semakin mudah dalam hal memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, minimnya kualitas tingkat pendidikan oleh wajib pajak karena kurangnya pemahaman akan dunia perpajakan yang telah ditetapkan akan berpengaruh dalam hal tidak dilakukannya pembukuan dan wajib pajak cenderung enggan atau bahkan tidak melaksanakan kewajiban pajaknya.

d. Presepsi atau Anggapan Oleh Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Bagi wajib pajak yang tidak memiliki tingkat kesadaran dan tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya akan diberikan sanksi perpajakan. Dan sanksi yang telah disiapkan untuk pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah diatur didalam Undang-undang yaitu berupa sanksi administrasi (berupa denda dan bunga) atau bahkan sanksi pidana. Dan dengan diberikannya sanksi perpajakan ini, wajib pajak diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban akan perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

1. Indikator Dari Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator yang dijelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak menurut (Muliari dan Setiawan, 2010) dapat dilihat dari ketepatan dalam hal waktu penyampaian pelaporan SPT. Pelaporan SPT dapat dikatakan tepat waktu apabila wajib pajak melakukan penyampaian laporan SPT sesuai atau tepat dengan waktu yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu dalam hal ini yaitu mencakup ketepatan dalam hal pembayaran pajak, bagi calon wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melakukan pengisian formulir dengan benar dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam dunia perpajakan.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Terdapat berbagai macam seorang wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam berbagai bidang, contohnya yaitu baik dalam segi bidang perdagangan, bidang ekonomi kreatif maupun bidang lainnya. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh (Arum, 2012) wajib pajak oleh orang pribadi yang telah melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah bagi mereka yang menyelenggarakan suatu kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tidak terikat oleh ikatan pemberi kerja manapun. Sedangkan wajib pajak usahawan adalah wajib pajak yang memiliki keahlian khusus dalam menjalankan sebuah usaha atau pekerjaan bebas yang dimana melalui usaha tersebut dapat menghasilkan penghasilan yang tidak terikat didalam lingkaran hubungan kerja. Contoh pekerjaan bebas yang dilakukan adalah seorang dokter yang melakukan praktik sendiri dirumah, pengacara atau konsultan, pekerjaan bebas atas nama pribadi (toko kelontong, minimarket, restoran, warung makan dan lain sebagainya). Wajib pajak tidak dikategorikan dalam wajib pajak usahawan atau wajib pajak yang melakukan suatu pekerjaan bebas apabila jika wajib pajak bekerja dalam sebuah perusahaan atau berstatus sebagai karyawan, contohnya adalah seorang manager yang bekerja dalam sebuah perusahaan maka wajib pajak ini tidak dikategorikan dalam wajib pajak usahawan atau wajib pajak yang melakukan suatu pekerjaan bebas.